

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Fakultas Hukum Universitas Pattimura memberikan informasi tentang capaian dari sasaran strategis dengan indikator yang diperjanjikan dalam Kontrak Kinerja dengan Rektor Universitas Pattimura tahun 2021. Realisasi anggaran sebesar 99,2 % berdasarkan evaluasi dari apa yang diperjanjikan melalui Perjanjian Kinerja (PK) Dekan dan Rektor Nomor 2589/UN13.1.1/KP/2021 terhadap Sasaran Strategis maupun indikator kinerja yakni :

1. Sasaran Strategi 1. “Kinerja Pengelolaan Keuangan Efektif, Efisien dan Akuntabel.

Indikator 1. Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya Operasional.

Pada Perjanjian Kerja besaran Rasio pendapatan PNBP Fak. Terhadap Operasional Fakultas Hukum disebutkan sebesar 90% dalam satu tahun anggaran namun dalam pelaksanaan dari total pendapatan sem. Ganjil/Genap Tahun 2021 sebesar 13.046.900.000,- yang menjadi biaya operasional 6.352.955.000,- atau 49% hal ini dikarenakan 40% dari PNBP Fakultas di alokasikan ke Belanja Remunerasi dan 20% ke Universitas.

Indikator 1.2. Jumlah Pendapatan PNBP ;

Jumlah Pendapatan PNBP yang diperjanjikan pada Perjanjian Kerja sebesar 12.490.400.000,- dan realisasi pendapatan PNBP Fakultas Hukum murni dari UKT sebesar 13.046.900.000,- mengalami kenaikan 556.500.000,-

Indikator 1.3. Jumlah Pendapatan PNBP yang bersumber dari pengelolaan Aset

Pendapatan PNBP dari pengelolaan Aset pada Fakultas Hukum dalam tahun ini dari ASET intelektual (saksi ahli) pada Perjanjian Kerja Pendapatan PNBP sebesar 24.500.000,- dan ini terpenuhi sampai dengan desember 2021

Indikator 1.4. Presentasi Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU

Pada modernisasi pengelolaan BLU Fakultas Hukum baru memulai melakukan kegiatan tersebut lewat menawarkan aplikasi iThenticate Similaritas ke unit-unit kerja untuk melakukan sharing resource berbayar.

2. Sasaran Strategis 2 “Layanan Prima”

Indikator 2.1. Persentase lulusan S1 yang berhasil mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta.

Capaian Fakultas Hukum unpati di tahun 2021 untuk lulusan yang telah bekerja pada lulusan April dan Agustus sebanyak 233 lulusan adalah sebesar 31,33 %, target dari target PK yang mengikuti target kementerian yakni 80 %. Upaya Fakultas Hukum Universitas Pattimura dalam peningkatan kualitas SDM lulusan adalah : a.) Mempersiapkan lulusan dengan memberikan pengetahuan dasar tentang berwirausaha , b) Mempersiapkan lulusan yang berkompeten dan berkualitas dalam upaya melanjutkan studi ke jenjang S2, guna meningkatkan Sumber Daya Manusia yang siap pakai dalam memenuhi pangsa pasar kerja, c). Lulusan S1 Dibekali dengan bersertifikasi/profesi.

Indikator 2.2. Presentase lulusan S1 yang menghabiskan paling tidak 20 SKS di luar kampus atau meraih prestasi minimal tingkat nasional. Capaian Fakultas Hukum Unpati sebesar 60, % dari target 30 %. Fakultas Hukum dalam realisasi kegiatan ini berupa mengirim 5 Mahasiswa Magang di PT. Pelindo Jakarta, 4 Mahasiswa Magang Pada DPR RI Jakarta, 6 Mahasiswa Mengikuti Program MBKM 18 Mahasiswa Menjuarai Juara 3 Tingkat Nasional Lomba Peradilan Semu, 1 Mahasiswa masuk dalam TIM PON Maluku, 1 Mahasiswa Juara 1 lomba Karya tyulis ilmiah Bahasa Inggris, 150 Mahasiswa Magang pada Kejaksaan Tinggi (KEJATI) Maluku.

Indikator. 2.3. Presentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS 100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industry atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 tahun. Presentase yang dicapai oleh Fakultas Hukum Universitas Pattimura 16.09% % dari target yang direncanakan 15 %. Dengan realisasi pada kegiatan 8 Dosen sebagai Tutor Tutorial Webinar (TUWEB) kampus Universitas Terbuka Ambon, 6 dosen membina Mahasiswa pada kegiatan lomba tingkat nasional dan memperoleh Juara selama lima tahun.

Indikator 2.4. Presentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi profesi yang diakui oleh dunia kerja atau berasal dari kalangan praktisi professional atau dunia kerja. Presentasi yang dicapai 46% dari jumlah dosen berkualifikasi akademik S3 47 Orang, dengan target yang direncanakan 40%, kinerja ini ditunjukkan dengan kegiatan dosen dengan kualifikasi S3 dipakai

sebagai saksi ahli pada Pengadilan Tinggi Negri Maupun TUN, Sebagai Tim Asisitensi pada Instansi Pemerintah dan BUMN, sebagai praktisi professional pada kegiatan seminar Nasional dll.

Indikator 2.5. Jumlah keluaran penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rocnognisi per internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen. Jumlah penelitian internasional yang dihasilkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pattimura per dosen berupa publikasi jurnal internasional sebanyak 19 Jurnal (data sinta.ristekbrin.go.id dan google sholar) dengan rincian 10 publikasi terindeks scopus dan 9 publikasi internasional lainnya terekam di Google Scholar , dari jumlah dosen tetap 87 orang atau capaian sebesar 0,21 % dari target 0,15. Dari capaian tersebut Fakultas Hukum Universitas Pattimura sudah memenuhi target namun upaya untuk meningkatkan terus penelitian guna pengembangan kualitas sumber daya manusia/dosen pendidikan tinggi.

Indikator 2.6. Presentase Program Studi S1 yang melaksanakan kerjasama dengan mitra. Program studi yang melaksanakan kerjasama dengan mitra sebesar 100 % dengan lingkup kerjasama dalam dan luar negeri meliputi penyelenggaraan pendidikan, Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kolaborasi riset dan pengembangan sumberdaya, penyelenggaraan karya ilmiah, yang terdiri dari 4 (empat) Kerjasama perpanjangan, dan 8 (delapan) Kerjasama baru ditahun 2021.

Indikator 2.7. Persentase Mata Kuliah Yang Menggunakan Metode Pembelajaran Pemecahan Kasus (Case Method) atau Pembelajaran Kelompok Berbasis Project. Metode pembelajaran ini sudah diterapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pattimura pada Program studi dengan 7 mata kuliah dari total 62 mata kuliah atau sebesar 11,29%, dan target pada PK Rektor sebesar 35%, ini masih belum memenuhi target, untuk saat ini fakultas hukum sementara melakukan revitalisasi kurikulum untuk menambah MK Praktek.

Indikator 2.8. Presentase program studi S1 yang memiliki sertifikat Internasional yang diakui pemerintah. Untuk indikator ini capaian Fakultas Hukum Universitas Pattimura sebesar 100 % atau 1 program studi (Ilmu Hukum) terakreditasi/sertifikasi internasional sudah pada tahun ke -2 dengan tiap tahun dilakukan surveilance untuk mempertahankan sertifikasi ISO 9001 ; 2015

Pagu dan realisasi anggaran Fakultas Hukum Unpatti tahun 2021

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Presentasi
1	Belanja Gaji	728.220.000,-	702.100.000,-	96,41
2	Barang	2.112.718.000,-	2.110.322.264,-	99,88
3	Pemeliharaan	931.518.000,-	931.502.623,-	99,99
4	Jasa	139.300.000,-	133.398.000,-	95,76
5	Perjalanan	793.501.000,-	777.419.950,-	97,97
6	Modal	1.647.698.000,-	1.647.272.000,-	99,97
Total		6.352.955.000,-	6.302.014.837,-	99,02%

Pengembangan Fakultas Hukum di susun dengan mempertimbangkan keadaan dan tantangan agar sasaran lima tahunan ke depan lebih realistis dan konsisten dengan prinsip-prinsip pengelolaan pendidikan yang efisien, efektif akuntabel dan demokratis.

Fakultas Hukum di bangun dengan melibatkan berbagai komponen secara fungsional penyelenggaraan Tri dharma Perguruan Tinggi yang masing masing memiliki perasoolan dan tantangan yang semakin kompleks.

Adapun permasalahan yang di hadapi dalam upaya pengembangan kedepan sebagai berikut :

- Kurikulum belum sesuai dengan kebutuhan stakeholder dan implementasi kebijakan MBKM.
- Evaluasi Pebelajaran belum sesuai dengan RPS dan CPL.
- Kerjasama pengembangan sumber daya manusia masih kurang
- Dosen relatif mengajar belum optimal
- Sistem Informasi manajemen (akademik, keuangan dan kepegawaian) belum terintegrasi dengan baik.
- Sarana dan prasarana laboratorium kriminologi, laboratorium computer, ruang mot court belum memadai.
- Sarana dan prasarana belum memenuhi dosen dengan kebutuhan khusus
- Penelitian yang di laksanakan belum sepenuhnya mengarah pada program oriented yang mendukung pencapaian visi lembaga.

- Hasil Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat belum terintegrasi secara baik pada pembelajaran Mata kuliah.
- Kinerja manajerial masih menyimpang dari SOP yang telah ditetapkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Fakultas Hukum

Fakultas Hukum Universitas Pattimura (FH UNPATTI) didirikan pada tanggal 3 Oktober 1956 yang dimulai dengan adanya Yayasan Perguruan Tinggi Maluku dan Irian Barat, atas prakarsa tokoh nasional Dr. J. B. Sitanala (Alm) dan kawan-kawan. Lepas dari tujuan sebagaimana yang digariskan oleh para pendiri, yakni keinginan menampung dan menyalurkan hasrat para lulusan SLTA di Maluku untuk melanjutkan studi pada tingkat universitas di luar daerah, namun karena kesulitan pembiayaan, hasrat tersebut kemudian tidak dapat terpenuhi, sehingga catatan pentingnya adalah bahwa kehadiran lembaga pendidikan tinggi hukum (sebagai lembaga pendidikan pertama di Maluku) justru membawa :

- (1) pemerataan pendidikan akademis dan
- (2) reorientasi di bidang sosial ekonomi dan sosial budaya.

Dalam perkembangannya, sejak tahun 1963 hingga saat ini, FH UNPATTI dipimpin oleh beberapa Dekan, yaitu

1. D.J. Sitanala (1971 - 1975)
2. Mr. Chr. Soplanit (1975 - 1979)
3. M. A.H. Tahapary, S.H. (1979 - 1983)
4. Ny. J.M. de Fretes/T, S.H. (1983 - 1987)
5. C. M. Pattiruhu, S.H. (1987 - 1995)
6. J .Leiwakabessy, S.H. (1995 - 1999)
7. Dr. Ronald Z. Titahelu, S.H., M.S. (1999 - 2000)
8. George Leasa, S.H., M.H. (2000 - 2009)

9. Prof. Dr. Marthinus Johannes Saptanno, S.H., M.Hum. (2009 - 2013)
10. Dr. Jantje Tjiptabudy, S.H., M.Hum. (2013 - 2017)
11. Dr. Rory Jeff Akyuwen, S.H., M.Hum. (2017 - saat ini)

Ketika Fakultas Hukum didirikan, selain melibatkan tenaga pengajar setempat (lokal), juga ikut dilibatkan beberapa tenaga pengajar luar, teristimewa dari Universitas Hasanudin Makassar, seperti Prof. Resink, Mr. Paul Moedigdo, Prof. Riekerk dan Prof. Tobing, dimana pada saat itu Fakultas Hukum baru memiliki 3 jurusan, yakni :

- (1) Jurusan Hukum Keperdataan
- (2) Jurusan Hukum Pidana
- (3) Jurusan Hukum Tata Negara

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar pada pendidikan tinggi, Fakultas Hukum kemudian mempersiapkan lulusannya untuk menjadi tenaga pengajar. Hingga tahun 1962 Yayasan Perguruan Tinggi Maluku dan Irian Barat kemudian mendirikan beberapa Fakultas antara lain Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian/Kehutanan dan Fakultas Peternakan. Dengan didirikannya Yayasan Maluku dan Irian Barat dengan beberapa fakultas, maka dengan Surat Keputusan Presiden RI. Nomor : 66 Tahun 1963 tanggal 23 April 2016, Fakultas Hukum berubah menjadi Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Perjuangannya menjadi sebuah perguruan tinggi negeri di daerah ini, tidak terlepas dari peran dan perjuangan beberapa lulusannya, seperti P. P. Tabalessy, S.H., A. K. Elly, S.H. dan F. P. B. Litaay, S.H. serta beberapa orang yang saat itu masih berstatus sebagai mahasiswa.

Perkembangan selanjutnya, dimana Fakultas Hukum Universitas Pattimura kemudian mulai menata dirinya, dan untuk memenuhi tuntutan pembangunan sesuai

kondisi geografis daerah Maluku, mantan Rektor Universitas Pattimura Ir. J. Nanlohy merestui dibukanya Jurusan Hukum Internasional.

Saat ini Fakultas Hukum Universitas Pattimura mempunyai 1 (satu) Program Studi yaitu Program Studi Ilmu Hukum, dan mempunyai 4 Bagian yaitu :

1. Hukum Keperdataan;
2. Hukum Pidana;
3. Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara;
4. Hukum Internasional

Dengan demikian, tata pengelolaan program studi dilaksanakan sepenuhnya oleh Program Studi. Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Para Ketua Bagian diangkat oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.

Pada tahun 2016, Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura mendapatkan **Akreditasi "A"** berdasarkan **Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 3290/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016.**

Tanggal 16 s.d 19 Desember 2019 Fakultas Hukum telah dilakukan *Audite Initial* ISO (*International Organization for Standardization*) 9001 : 2015 Oleh BSI (*British Standard Institution*), dan mendapat **Assesment Report "Recommended for ISO 9001:2015"** yang disampaikan dalam Meeting Top Management pada tanggal 19 Desember 2019 Oleh Auditor BSI a.n. Boedi Prasetyo Minarto.dengan rekomendasi sebagai berikut : *RECOMMENDED - Corrective Action Plan Required ('Minor' findings only): The audited organization maybe recommended for certification, based upon the acceptance of a satisfactory corrective action plan for all 'Minor' findings as shown in this report. Effective implementation of corrective actions will be reviewed during the next surveillance audit. Please submit a plan to BSI detailing the nonconformity, the root cause, correction and your proposed corrective action, with responsibilities and timescales allocated. The plan is*

to be submitted no later than 07/01/2020. If the corrective action plan is not received by this date you may be putting your certification status at risk. Send the plan through the BSI Assurance Portal (if this is enabled for your account) or by email to boediprasetyo.minarto@bsigroup.com, referencing the report number 3108329. (Assesment Report).

B. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Fakultas Hukum Universitas Pattimura disusun berdasarkan capaian kinerja tahun 2019, capaian kinerja diukur dengan Indikator-Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk semua program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana yang di tuangkan dalam Renstra Fakultas Hukum Universitas Pattimura tahun 2016 – 2019.

Dasar hukum Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah :

1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Instruksi Presiden Nomor 7/1999 Tentang kuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29/2011.
6. Permenristekdikti No. 20. Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura.
7. Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

8. SK Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Pattimura
9. SK Permenristekdikti No. 142/M/KPT/2019 tentang Indikator Kinerja Utama bagi Perguruan tinggi yang sudah Badan Layanan Umum (BLU)
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

Fakultas Hukum Universitas Pattimura sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Hukum dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, melaksanakan fungsi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut universitas Pattimura mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut ;

Tabel 1.1

No	Nama Generik Unit	Nama Unit di Fakultas	Tugas Pokok dan Fungsi
1	Pimpinan Fakultas	Dekan	Dekan Fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Fakultas menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan Fakultas; b. Pelaksanaan penelitian untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

			<p>c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>d. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan</p> <p>e. Pelaksanaan urusan tata usaha.</p>
2		Wakil Dekan Bid. Akademik	Wakil Dekan Bidang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3		Wakil Dekan Bid. Umum dan Keuangan	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, umum, dan sistem informasi.
4		Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.
5	Senat Fakultas	Senat Fakultas Hukum	Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas diatur dalam Peraturan Rektor.
6	Bagian Tata Usaha		Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan layanan akademik dan kemahasiswaan, serta perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan di

			<p>lingkungan Fakultas.</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:</p> <p>a. pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas;</p> <p>b. Pelaksanaan layanan kemahasiswaan dan alumni di lingkungan Fakultas;</p> <p>c. Pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan di lingkungan Fakultas;</p> <p>d. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian di lingkungan Fakultas;</p> <p>e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtangaan, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Fakultas;</p> <p>f. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Fakultas; dan</p> <p>g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Fakultas.</p>
7	Subbagian Akademik	Subbagian Akademik Fakultas Hukum	mempunyai tugas melakukan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8	Subbagian Umum dan Barang Milik Negara	Subbagian Umum dan Barang Milik Negara Fakultas Hukum	mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtangaan, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Fakultas.
9	Subbagian Keuangan dan Kepegawaian	Subbagian Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Hukum	mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian.
10	Subbagian Kemahasiswaan	Subbagian Kemahasiswaan Fakultas Hukum	mempunyai tugas melakukan layanan kemahasiswaan dan alumni di lingkungan Fakultas.
11	Prodi	Ketua Prodi	merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode

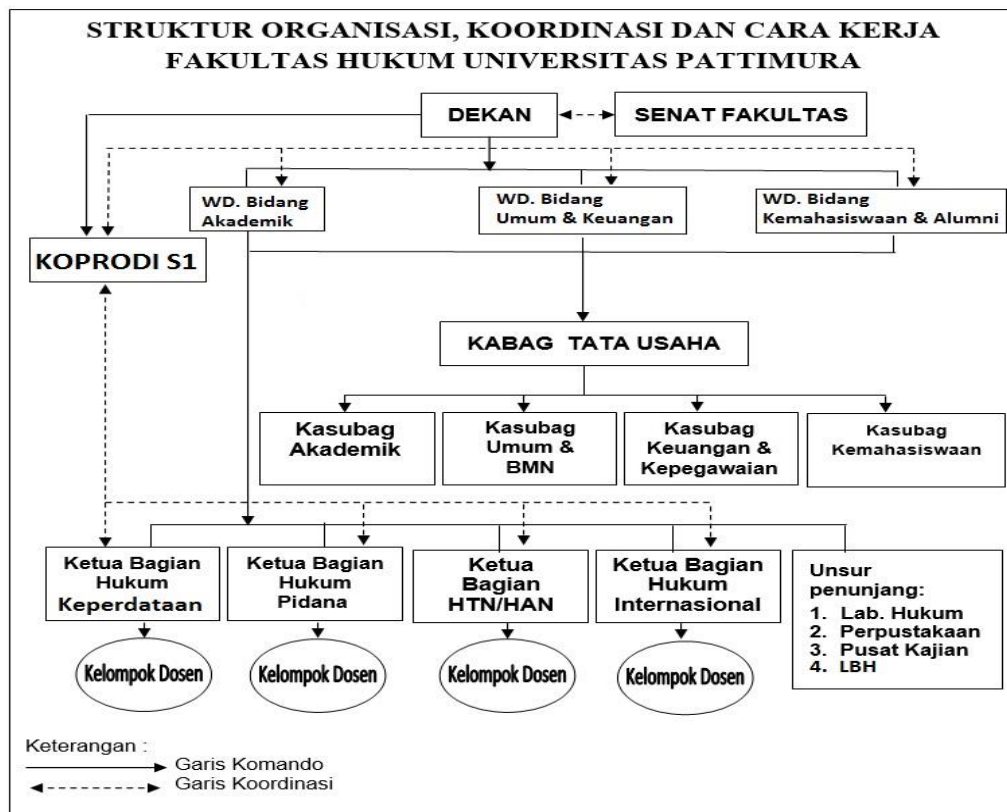
			pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
12	Bagian Bagian	Ketua Bagian	merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi
13	Laboratorium	Kepala Leboratorium	merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan Fakultas.
14	Kelompok Jabatan Fungsional Dosen.	Tenaga Dosen /Pengajar	terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya.

Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi Fakultas Hukum mengacu pada statute dan OTK Universitas Pattimura, serta renstra Fakultas Hukum Tahun 2021-2024. Operasionalnya dilakukan dengan cara memonitoring dan evaluasi secara berjenjang baik di level Pimpinan sampai ke Pegawai Pelaksana. Dalam pelaksanaan pembelajaran dibawah tanggungjawab wakil dekan bidang akademik yang membawaih segala aktivitas kegiatan perkuliahan, penelitian dan pengabdian dibantu oleh tenaga kependidikan pada subbagian akademik dalam melaksanakan administrasi akademik mahasiswa dan perkuliahan, untuk kegiatan operasional perkantoran yang meliputi kegiatan pengelolaan anggaran kegiatan dan kepegawaian berada dibawah tanggungjawab wakil dekan bidang Umum dan Keuangan, sementara untuk kegiatan kemahasiswaan dan alumni menjadi tanggungjawab wakil dekan bidang kemahasiswaan.

Pada Fakultas hukum terdapat satu Prodi Ilmu Hukum dengan membawahi empat bagian yaitu :

1. Bagian Pidana
2. Bagian HTN/HAN
3. Bagian Perdata
4. Bagian Hukum Internasional.

Struktur Organisasi Fakultas Hukum pada Gambar dibawah ini :



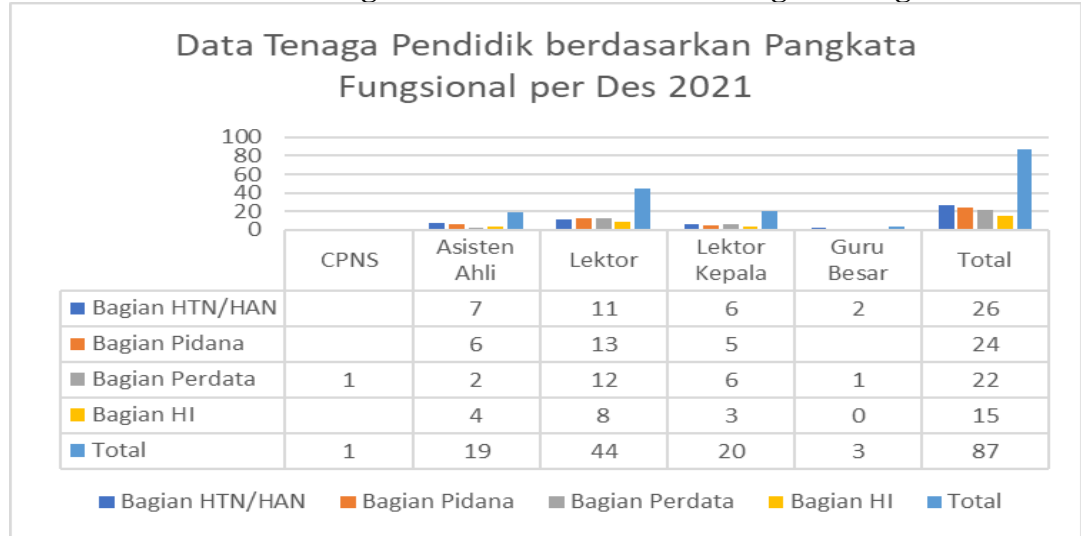
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Fakultas Hukum Universitas Pattimura

D. Sumber Daya Manusia

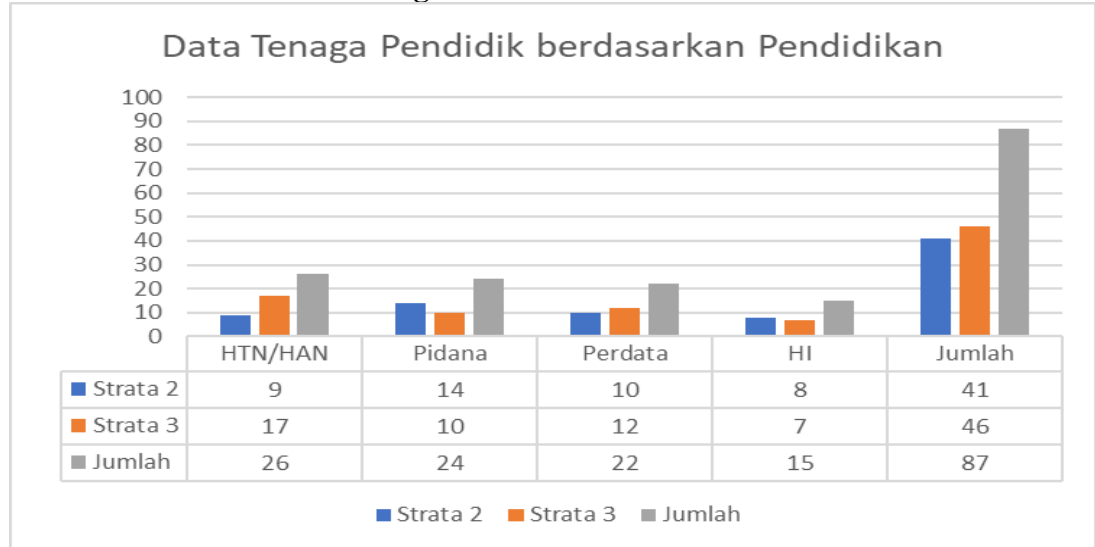
Keadaan sumber daya manusia/SDM Fakultas Hukum dengan tenaga pendidik ASN sebanyak 87 Dosen (belum termasuk dosen non ASN 5 Orang) dan tenaga kependidikan sebanyak 33 (terdiri dari 10 ASN dan 23 Honorer) belum termasuk

satpam 4 orang orang dengan kualifikasi Pendidikan SMA, S1, S2, S3 dan Guru Besar.

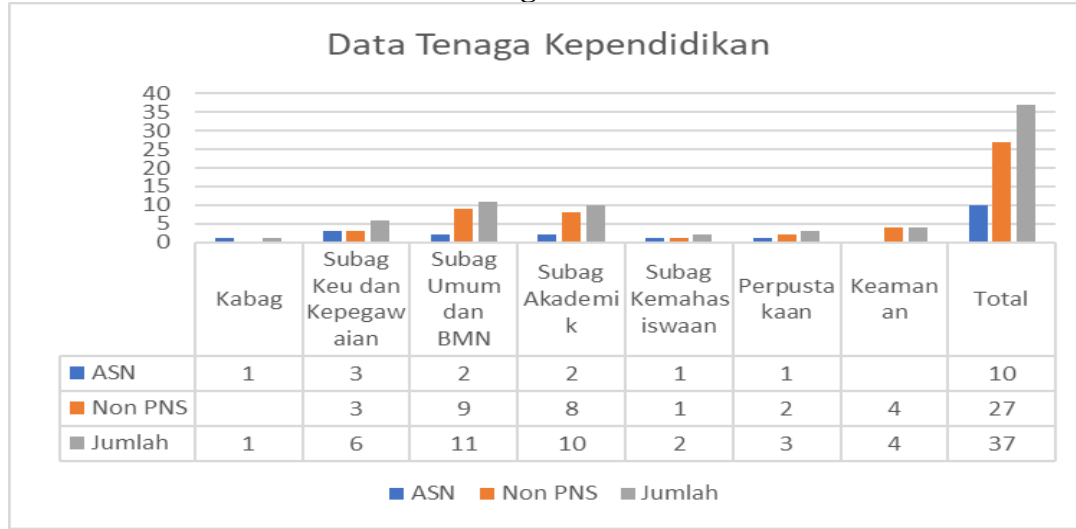
Grafik 1.1. Keadaan Tenaga Pendidik Berdasarkan Pangkat Fungsional



Grafik 1.2. Keadaan Tenaga Pendidik Berdasarkan Pendidikan



Grafik 1.3. Keadaan Tenaga Pendidik Berdasarkan Pendidikan



E. Anggaran

Pagu anggaran Fakultas Hukum Tahun 2021 sebesar : Rp. 6.352.955.000,-

Tabel. 1.2. Pagu Anggaran Fakultas Hukum Tahun 2021 Berdasarkan Output Kegiatan

No	Kode	Satker/Kegiatan/Output	Pagu
1	4471.QEI.001	Penelitian PNBPN/BLU	786,104,000
2	4471.QEI.002	Pengabdian kepada masyarakat pnbp/blu	80,000,000
3	4471.RAA.001	Sarana pendukung pembelajaran (pnbp/blu)	579,143,000
4	4471.RAA.002	Sarana pendukung perkantoran (pnbp/blu)	716,511,000
5	4471.RCA.002	Pemeliharaan sarana perkantoran (pnbp/blu)	29,000,000
6	4471.RDJ.002	Pemeliharaan prasarana perkantoran (pnbp/blu)	323,044,000
7	4471.SBA.001	Layanan pendidikan (pnbp/blu)	232,280,000
8	4471.TAA.001	Dukungan layanan pembelajaran (pnbp/blu)	699,238,000
9	4471.TAM.001	Layanan pengembangan sistem tata kelola kelembagaan dan sdm (pnbp/blu)	1,262,017,000
10	4471.TAA.001	Dukungan layanan pembelajaran (pnbp/blu)	958.620.000,-
11	4471.TAM.001	Layanan pengembangan sistem tata kelola kelembagaan dan sdm (pnbp/blu)	686.998.000,-
Total			RP. 6.352.955.000,-

F. Sistematika Penyajian

Laporan kinerja ini melaporkan capaian kinerja Fakultas Hukum Universitas Pattimura tahun 2021 sesuai Renstra Tahun 2021-2025. Analisis Capaian Kinerja (Performance Result) diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (Performance Agreement) sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi, yang memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (Performance Gap) sebagai perbaikan kinerja di masa mendatang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Fakultas Hukum Universitas Pattimura tahun 2021 adalah sebagai berikut :

A. Ikhtisar Eksekutif, menyajikan ringkasan pencapaian Fakultas Hukum Universitas Pattimura tahun 2021.

B. BAB. I - Pendahuluan, menjelaskan latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi, serta struktur organisasi, sumber daya manusia dan anggaran.

C. BAB. II - Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan Rencana Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi, dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

D. BAB. III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021, menjelaskan tentang pengendalian, pengukuran dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta pencapaian kinerja sebagai pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis pada tahun 2021.

E. BAB. IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dan upaya perbaikan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

2.1. Visi Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Fakultas Hukum Universitas Pattimura sebagai bagian integral dari Universitas Pattimura dan sebagai pengemban amanat penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum berupaya meningkatkan mutu dengan memenuhi harapan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Universitas Pattimura. Visi Fakultas Hukum Universitas Pattimura merupakan penjabaran terhadap Visi Universitas Pattimura yaitu “Terwujudnya Universitas Unggul, Profesional berkarakter Kepulauan dalam menghasilkan SDM Pancasila yang kompeten, berakhlak mulia, dalam keragaman kampus orang basudara 2035” yang dikhususkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum agar terjamin konsistensi dan linearitas implementasi kebijakan di Universitas Pattimura.

Adapun Visi Fakultas Hukum Universitas Pattimura adalah:

“Menjadi Fakultas Hukum Unggul dan Profesional berstandar Internasional melalui pengembangan Hukum berkarakter Kepulauan”

Visi Fakultas Hukum Universitas Pattimura ini merupakan komitmen Fakultas Hukum Universitas Pattimura sebagai penyelenggara pendidikan tinggi yang merupakan bagian integral dari Universitas Pattimura dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum. Visi Fakultas Hukum Universitas Pattimura merupakan harapan dan aspirasi Fakultas Hukum Universitas Pattimura untuk waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam memandang Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan capaian yang harus dilakukan. Berdasarkan Visi Fakultas Hukum Universitas Pattimura sebagaimana dimaksud, terdapat beberapa parameter yang

merupakan harapan dan aspirasi Fakultas Hukum Universitas Pattimura, antara lain Unggul, Profesional, standar Internasional, dan berkarakter Kepulauan. Penjabaran dari keempat parameter dimaksud sebagai berikut:

- ***Fakultas Hukum Unggul***: mengandung makna terkemuka dan maju (*excellent*) dalam menghasilkan sumber daya manusia (cendekia) berkualitas dengan menguasai ilmu hukum dengan kemampuan softskill yang pancasilais, berakhlak mulia, berkarakter dan memiliki kemampuan ilmiah untuk menghasilkan penelitian berskala nasional dan internasional dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara;
- ***Fakultas Hukum Profesional***: mengandung makna mengedepankan kualitas dalam berbagai aspek, baik kemampuan sumber daya manusia maupun produk ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ilmu hukum yang dihasilkan;
- ***Fakultas Hukum berstandar Internasional***: mengandung makna mengedepankan penyelenggaraan pendidikan tinggi ilmu hukum sesuai dengan standar internasional sebagai upaya adaptasi terhadap perkembangan penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan menghasilkan produk-produk kreatif dan inovatif untuk meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi serta memberikan kepuasan bagi pemangku kepentingan;
- ***Fakultas Hukum berkarakter Kepulauan***: mengandung makna mengedepankan karakteristik kepulauan sebagai pola ilmiah pokok dalam pengembangan hukum baik pembelajaran maupun produk penelitian yang bercirikan hukum kepulauan dan masyarakat hukum adat sebagai karakter penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum yang berbeda dengan pendidikan tinggi hukum lainnya untuk memberikan ruang kompetitif yang unggul dan profesionalitas.

2.2. Misi Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Untuk mendukung pencapaian Visi Fakultas Hukum Universitas Pattimura 2021-2025, ditetapkan Misi Fakultas Hukum Universitas Pattimura, meliputi:

- 1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi hukum dengan keunggulan kelas dunia untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan dapat diterima di pasar kerja nasional maupun internasional
- 2) Meningkatkan mutu penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan pendidikan hukum dan pembangunan nasional melalui produk karya ilmiah yang memiliki karakter dalam pengembangan hukum.
- 3) Meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat melalui hasil-hasil penelitian hukum dan menerapkan ilmu hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menunjang pembangunan nasional.
- 4) Mengembangkan Fakultas Hukum sebagai lembaga yang unggul, profesional dan berkualitas melalui penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang sesuai dengan standar internasional.

2.3. Tujuan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

- a. Tujuan dari Misi 1 **“Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi hukum dengan keunggulan kelas dunia untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan dapat diterima di pasar kerja nasional maupun internasional”**, adalah :

- 1)Penguatan sistem tata kelola pendidikan tinggi hukum yang transparan, partisipatif dan akuntabel;
- 2)Penyelenggaraan kebijakan Merdeka Belajar dan pengalaman belajar; 3) Peningkatan mutu institusi memperoleh status akreditasi unggul; 4) Peningkatan kualitas dan kompetensi lulusan.

b. Tujuan dari Misi 2 **“Meningkatkan mutu penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan pendidikan hukum dan pembangunan nasional melalui produk karya ilmiah yang memiliki karakter dalam pengembangan hukum”**, adalah :

- 1)Pelaksanaan penelitian berskala nasional dan internasional;
- 2)Peningkatan jumlah dan kualitas penelitian serta dana penelitian secara berkelanjutan;
- 3)Penyelenggaraan desiminasi hasil-hasil penelitian untuk pembangunan masyarakat, daerah dan bangsa;
- 4)Penyelenggaraan kerjasama penelitian baik nasional maupun internasional.

c. Tujuan dari Misi 3 **“Meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat melalui hasil-hasil penelitian hukum dan menerapkan ilmu hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menunjang pembangunan nasional”**, adalah :

- 1) Pengembangan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian untuk pemberdayaan masyarakat;

- 2) Penyelenggaraan kerjasama pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan publikasi serta pendanaan;

d. Tujuan dari Misi 4 **“Mengembangkan Fakultas Hukum sebagai lembaga yang unggul, profesional dan berkualitas melalui penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang sesuai dengan standar internasional”**, adalah :

- 1) Penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum melalui sistem penjaminan mutu;
- 2) Pengembangan fakultas dan program studi dengan status akreditasi unggul dan internasional;
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana dan teknologi informasi dalam pengembangan pendidikan tinggi hukum.

2.4. Sasaran Fakultas Hukum Universitas Pattimura

a. Sasaran dari Tujuan Misi 1 :

- 1) Meningkatnya sistem tata kelola pendidikan tinggi hukum yang partisipatif, transparan, dan akuntabel;
- 2) Terlaksananya kebijakan Merdeka Belajar;
- 3) Terselenggaranya proses pembelajaran yang bermutu melalui kurikulum berbasis Merdeka Belajar;
- 4) Meningkatnya prestasi mahasiswa dalam kegiatan penalaran dan bakat;
- 5) Meningkatnya jurnal ilmiah fakultas menjadi jurnal bereputasi internasional dan terakreditasi nasional;

- 6) Teringkatnya kompetensi lulusan;
- 7) Tersedianya tenaga pendidik yang berkualitas.

b. Sasaran dari Tujuan Misi 2 :

- 1) Meningkatnya partisipasi dosen peneliti dan mahasiswa dalam jumlah dan kualitas;
- 2) Terselenggaranya penelitian berskala nasional dan internasional;
- 3) Terhasilkannya produk hasil penelitian berkualitas yang sesuai dengan visi dan misi;
- 4) Terselenggaranya kerjasama penelitian dalam jejaring nasional dan internasional;
- 5) Meningkatnya jumlah dan kualitas serta dana penelitian;
- 6) Terselenggaranya diseminasi hasil-hasil penelitian untuk kepentingan pembangunan daerah dan masyarakat;
- 7) Tersedianya perencanaan dan roadmap penelitian yang didasarkan pada visi dan misi.

c. Sasaran dari Tujuan Misi 3 :

- 1) Terserapnya ilmu hukum melalui hasil-hasil penelitian oleh penelitian berkualitas untuk pemberdayaan masyarakat;
- 2) Meningkatnya publikasi jurnal pengabdian terhadap hasil penelitian dosen;
- 3) Tersedianya pendanaan pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Terselenggaranya kerjasama dengan LPPM dalam pengembangan pengabdian kepada masyarakat

- 5) Tersedianya perencanaan dan roadmap pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan visi dan misi;
- 6) Terselenggaranya kerjasama dengan pihak lainnya dalam pengembangan pengabdian kepada masyarakat.

d. Sasaran dari Tujuan Misi 4 :

- 1)Terkembangnya budaya mutu melalui unit penjaminan mutu berdasarkan siklus penjaminan mutu secara berkelanjutan;
- 2)Meningkatnya mutu program studi menjadi status unggul dan internasional;
- 3)Meningkatnya sarana dan prasarana pembelajaran, laboratorium penunjang proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai Standar Nasional DIKTI;
- 4)Terbentuknya sistem informasi terpadu, baik akademik, kepegawaian, keuangan, aset, dan lain-lain.

2.5. Tata Nilai

Tata Nilai FH UNPATTI merupakan penjabaran dari Tata Nilai Universitas Pattimura sebagai landasan dalam penerapan Visi dan Misi FH UNPATTI, sekaligus merupakan nilai dasar sikap dan perilaku seluruh komponen FH UNPATTI dalam mengemban tugas pengembangan institusi ke depan.

Tata nilai yang dikembangkan dan dijabarkan adalah:

- a. **Integritas:** terkandung makna keselarasan pikiran, antara perkataan dan perbuatan. Nilai integritas yang dimiliki selalu menjunjung tinggi nilai luhur dan keyakinan,

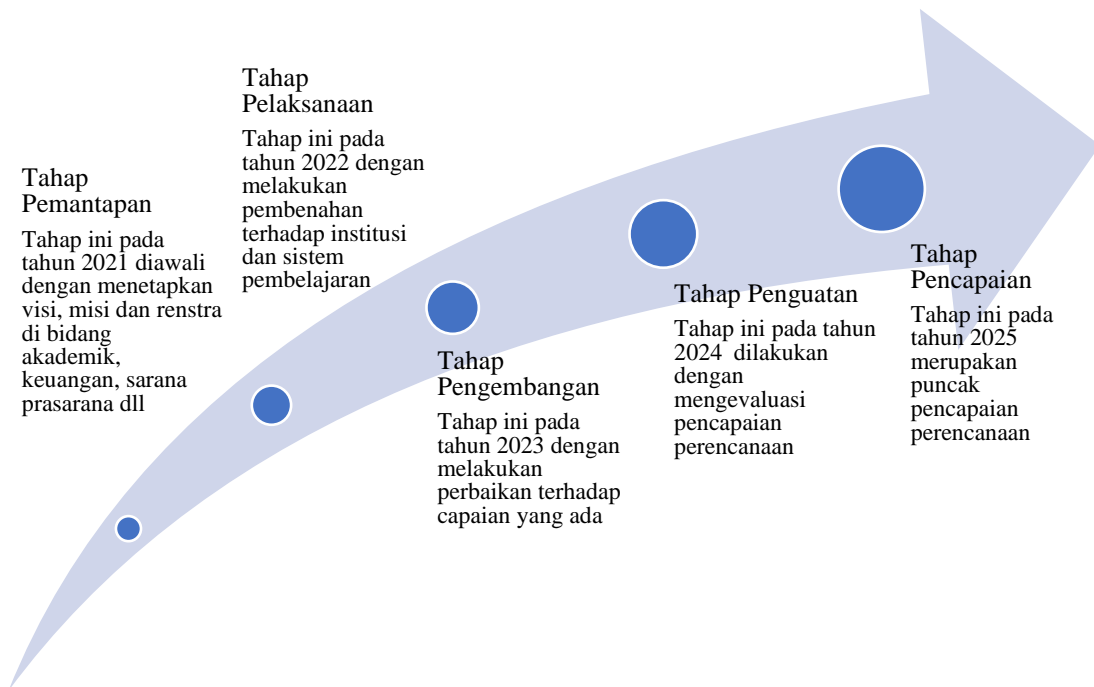
terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran, tindakan dan mengemban kepercayaan;

- b. **Kreatif dan Inovatif:** bermakna memiliki daya cipta, kemampuan untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, yakni gagasan, metode,, alat, indicator dan nilai kreatif inovatif, dengan pola pikir, cara pandang dan pendekatan yang variatif terhadap permasalahan dan mampu menghasilkan karya baru;
- c. **Inisiatif:** bermakna memiliki kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut, dengan indikator, responsif melayani kebutuhan, bersikap positif terhadap kebutuhan, memiliki dorongan untuk mengidentifikasi masalah atau peluang dan mengambil tindakan nyata;
- d. **Pembelajar:** Terkandung makna ikhtiar untuk selalu berusaha mengembangkan kompetensi dan profesionalisme, memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman, suka mempelajari yang baru, rajin, dan memanfaatkan waktu dengan baik;
- e. **Meritokrasi:** Menjunjung tinggi nilai meritokrasi yakni nilai keadilan dalam pemberian penghargaan, melalui kompetisi sehat dan professional, memberi penghargaan dan hukuman secara proporsional sesuai kinerja;
- f. **Aktif Partisipatif:** mengandung makna senantiasa aktif partisipatif dalam setiap kegiatan. Dengan keterlibatan langsung pada setiap kegiatan mendukung visi dan misi universita. Peduli terhadap lingkungan sekitar, dan tidak bersifat pasif;

- g. **Tanpa Pamrih:** memiliki makna bekerja dengan tulus, ikhlas penuh dedikasi, penuh komitmen dalam pekerjaan, rela berkorban, berperilaku 4S (senyum, sapa, sopan dan santun).

2.6. Tonggak Capaian (Milestone)

Visi “**Menjadi Fakultas Hukum Unggul dan Profesionalitas berstandar Internasional melalui pengembangan Hukum berkarakter Kepulauan**”, akan dicapai melalui tahapan pembangunan seperti di bawah ini:



2.7. Arah Kebijakan dan Strategi Fakultas Hukum Universitas Pattimura

2.1.1. Misi 1: Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi hukum dengan keunggulan kelas dunia untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan dapat diterima di pasar kerja nasional maupun internasional.

1. Arah Kebijakan :

Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana pembelajaran.

Strategi :

- a. Mendorong dosen untuk mengikuti pendidikan akademik doktoral di perguruan tinggi nasional dan internasional;
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas dan kualitas dosen dalam proses pembelajaran;
- c. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas dosen melalui kegiatan di luar kampus;
- d. Menilai dan evaluasi dosen dalam proses pembelajaran;
- e. Mengadakan tenaga kependidikan dan mengembangkan kapasitas dalam penyelenggaraan pelayanan pembelajaran;
- f. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pembelajaran

2. Arah Kebijakan :

Mengembangkan pembelajaran sesuai Merdeka Belajar dan berbasis teknologi informasi Strategi :

- a. Mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebijakan Merdeka Belajar dan kebutuhan pasar;

- b. Meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran berbasis teknologi informasi;
- c. Mengembangkan kemampuan teknologi informasi untuk menunjang pembelajaran Revolusi Industri 4.0 dan era society 5.0
- d. Mengembangkan pembelajaran kelas internasional

3. Arah Kebijakan 3 :

Meningkatkan kualitas dan prestasi mahasiswa di bidang penalaran, minat dan bakat.

Strategi :

- a. Mendorong kegiatan Merdeka Belajar mahasiswa di luar kampus sebagai media pengalaman pembelajaran;
- b. Meningkatkan kompetensi dan profesi lulusan;
- c. Mengembangkan organisasi kemahasiswaan;
- d. Menyelenggarakan kegiatan mahasiswa secara internal di bidang penalaran dan pengembangan minat dan bakat;
- e. Mengikutkan mahasiswa berprestasi dalam berbagai jenis lomba pada skala nasional dan internasional;
- f. Melaksanakan tracer study secara regular dan berkelanjutan;

2.1.2. Misi 2: Meningkatkan mutu penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan pendidikan hukum dan pembangunan nasional melalui produk karya ilmiah yang memiliki karakter dalam pengembangan hukum.

1. Arah Kebijakan :

Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian pada skala nasional dan internasional Strategi :

- a. Menyusun roadmap penelitian;
- b. Meningkatkan kapasitas dosen peneliti;
- c. Meningkatkan mutu dan linierisasi hasil penelitian dengan pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat;

2. Arah Kebijakan :

Meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah Strategi :

- a. Meningkatkan kualitas publikasi pada level nasional dan internasional;
- b. Menerbitkan jurnal fakultas bereputasi;
- c. Meningkatkan publikasi dan paten/HaKI;
- d. Meningkatkan penulisan dan penerbitan buku.

3. Arah Kebijakan :

Menyediakan sarana dan prasarana, pendanaan dan fasilitas penunjang penelitian
Strategi :

- a. Meningkatkan kinerja pusat-pusat studi;
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung penelitian;
- c. Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana berbasis komersil.
- d. Meningkatkan pendanaan penelitian

2.1.3. Misi 3: Meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat melalui hasil-hasil penelitian hukum dan menerapkan ilmu hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menunjang pembangunan nasional .

1. Arah Kebijakan :

Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat Strategi :

- a. Menyusun roadmap pengabdian kepada masyarakat;

b. Meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

c. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat

2. Arah Kebijakan :

Menerapkan hasil penelitian hukum dan HaKI untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah Sasaran :

a. Meningkatkan kerjasama kemitraan dengan negeri/desa dan pemerintah daerah;

b. Menerapkan hasil-hasil penelitian hukum kepada masyarakat;

3. Arah Kebijakan :

Menyediakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat

Strategi :

a. Meningkatkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

2.1.4. Misi 4 : Mengembangkan Fakultas Hukum sebagai lembaga yang unggul, profesional dan berkualitas melalui penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang sesuai dengan standar internasional.

1. Arah Kebijakan :

Meningkatkan budaya mutu melalui sistem penjaminan mutu internal Strategi :

a. Mengembangkan unit penjaminan mutu fakultas dan unit pengelola program studi;

b. Melaksanakan siklus penjaminan mutu secara berkelanjutan;

c. Meningkatkan kapasitas dan kualitas auditor internal;

d. Menyesuaikan dan meningkatkan dokumen standar mutu;

2. Arah Kebijakan :

Meningkatkan kualitas fakultas dan program studi Strategi :

- a. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia program studi;
- b. Meningkatkan status akreditasi program studi berskala nasional dan internasional;
- c. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana
- d. Mengembangkan institusi berbasis teknologi informasi
- e. Meningkatkan kerjasama fakultas dengan lembaga-lembaga lainnya.

Sasaran strategis tersebut tertuang dalam Indikator Kinerja Universitas Pattimura dan juga menjadi indikaor kinerja yang harus dicapai oleh Fakultas Hukum Universitas Pattimura ditahun 2021 dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Bobot	
(1)	(2)	(3)	(4)		
I	Kinerja Pengelolaan Keuangan Efektif, Efisien dan Akuntabel	1. Rasio Pendapatan PNBPFak. Terhadap Biaya Operasional	%	52,00	90%
		2. Jumlah Pendapatan PNBPF	Rp	12.490.400.000,-	100 %
		3. Jumlah Pendapatan PNBPF Yang bersumber dari Pengelolaan Aset	Rp	24.500.000,-	100 %
		4. Modernisasi pengelolaan Keuangan PNBPF	%	45,00	100 %
II	Layanan Prima	5. Presentasi Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang Berhasil mendapat Pekerjaan, Melanjutkan Studi, atau Menjadi Wiraswasta.	%	26,00	100 %
		6. Presentasi Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang Menghabiskan Paling Tidak 20 sks di luar Kampus atau Meraih Prestasi Paling Rendah	Orang	80	100 %

	Tingkat Nasional.			
7.	Presentasi Dosen yang Berkegiatan Tridarma di Kampus Lain, di QS100 Berdasarkan Bidang Ilmu (<i>QS100 by Subject</i>), Bekerja sebagai Praktisi Didunia Industri, atau Membina Mahasiswa yang Berhasil Meraih Prestasi Minimal Tingkat Nasional Dalam 5 (lima) Tahun Terakhir	%	15	100 %
8.	Persentasi Dosen Tetap Berkualifikasi Akademik S3 , memiliki Sertifikasi Kompetensi /Profesi yang diakui oleh Industri dan Dunia Kerja, atau berasal dari Kalangan Praktisi Profesional, Dunia Industri, atau Dunia Kerja	%	40	100 %
9.	Jumlah Keluaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berhasil Mendapat Rekognis Internasional atau diterapkan Oleh Masyarakat Per Jumlah Dosen	%	0,15	100 %
10	Persentasi Prodi S1 dan D4/D3/D2 yang Melaksanakan Kerjasama dengan Mitra.	Jml	15	100 %
11	Persentasi Mata Kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan pemecahan kasus (<i>case Method</i>) atau pembelajaran Kelompok Berbasis Projek (<i>Project-based</i>) Sebagai Bobot Evaluasi.	Jml	1	100 %
12	Presentasi Program Studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki Akreditasi atau Sertifikasi Internasional yang diakui Pemerintah.	%	1	100

Tabel 2.1 Kontrak Kinerja Fakultas Hukum dengan Universitas Tahun 2020

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

A. Indikator dan Capaian Kinerja Organisasi

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari Kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2021 dalam lampiran Salinan Keputusan memuat 8 (delapan) indikator kinerja utama dengan definisi, kriteria, dan formula dalam menetapkan rencana kinerja, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen kontrak dan perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja, sementara target dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Dekan dengan Rektor dengan pada lampiran surat Nomor ; 2589/UN13.1.1/KP/2021 tentang Perjanjian Kinerja dimana target indikator Utama Perguruan Tinggi Negeri untuk Fakultas Hukum Universitas Pattimura (PTN BLU) sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Rektor dengan Dekan (Lampiran I). yang berisi sasaran Strategis yaitu pertama Kinerja Pengelolaan keuangan efektif, efisien dan akuntabel indikator dan yang kedua Layanan Prima. Indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja juga terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Fakultas Hukum Universitas Pattimura periode 2021 – 2025 yang telah direvisi oleh tim penyusun Renstra berdasarkan SK Rektor Nomor /UN13/SK/2021 tanggal 3 Agustus 2021.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran Kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial

yang dicapai, seberapa bagus kinerja keuangan organisasi Fakultas dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran capaian kinerja Fakultas Hukum 2021 dilakukan dengan cara membandingkan capaian kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Dengan membandingkan antara realisasi dengan target maka dapat dilihat jumlah presentasi pencapaian pada masing-masing indikator kinerja. Dengan diketahui capaian kinerja, maka dapat dianalisis faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan yang selanjutnya dapat dipetakan kekurangan dan kelemahan realiasi rencana kegiatan, kemudian ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang, secara lebih terinci capaian indikator kinerja dijelaskan dalam analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1.1. Capaian Kinerja Fakultas Hukum Unpatti

Perjanjian Kinerja (PK) yang disepakati oleh Rektor Universitas Pattimura dan Dekan Fakultas Hukum Unpatti dengan menetapkan sasaran dan 8 indikator kinerja tahun 2021 adalah:

Sasaran Strategi 1.

Kinerja Pengelolaan Keuangan Efektif, Efisien dan Akuntabel

Indikator Kinerja : 1.1.Rasio Pendspata PNBPFakultas Terhadap Biaya Operasional

Pada Perjanjian Kerja besaran Rasio pendapatan PNBPFak. Terhadap Operasional Fakultas Hukum disebutkan sebesar 90% dalam satu tahun anggaran namun dalam pelaksanaan dari total pendapatan sem.Ganjil/Genap Tahun 2021 sebesar 13.046.900.000,- yang menjadi biaya operasional 6.352.955.000,- atau 49% hal ini dikarenakan 40% dari PNBPFakultas di alokasikan ke Belanja Remunerasi dan 20% ke Universitas yang digunakan untuk layanan kemahasiswaan dan akademik pada tingkat universitas.

Indikator 1.2. Jumlah Pendapatan PNB

Jumlah Pendapatan PNB yang diperjanjikan pada Perjanjian Kerja sebesar 12.490.400.000,- dan realisasi pendapatan PNB Fakultas Hukum murni dari UKT sebesar 13.046.900.000,- mengalami kenaikan 556.500.000,-

Indikator 1.3. Jumlah Pendapatan PNB yang bersumber dari pengelolaan Aset

Pendapatan PNB dari pengelolaan Aset pada Fakultas Hukum dalam tahun ini dari ASET intelektual (saksi ahli) pada Perjanjian Kerja Pendapatan PNB sebesar 24.500.000,- dan ini terpenuhi sampai dengan desember 2021

Indikator 1.4. Presentasi Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU.

Pada modernisasi pengelolaan BLU Fakultas Hukum baru memulai melakukan kegiatan tersebut lewat menawarkan aplikasi iThenticate Similaritas ke unit-unit kerja untuk melakukan sharing resource berbayar.

Dengan meningkatkan kinerja dengan berpedoman pada kriteria penilaian yang meliputi :

1. Rencana Strategis. Rencana Strategis Fakultas Hukum Universitas Pattimura periode 2021 – 2025 sudah dilakukan revisi dan menyelaraskan dengan Renstra Universitas Pattimura.
2. Pengukuran Kinerja. Fakultas Hukum dalam mengukur kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja dan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun berjalan terhadap capaian yang dilakukan pada tahun sebelumnya. Indikator kinerja meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi adalah dengan mengukur progress pelaksanaan program kegiatan dan anggaran setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan dan dibahas dalam rapat evaluasi tingkat pimpinan Fakultas.
3. Pengelolaan Data Kinerja Untuk mengolah data kinerja,

Fakultas Hukum Unpatti memiliki SOP dan instrumen yang dapat menyimpan data namun belum dilakukan secara terpadu ada beberapa aplikasi yang digunakan antara lain: Sistem tata persuratan online e-Office dengan link. <https://fhunpatti.web.id/login>, Sistem informasi data Kepegawaian SIMPEG dengan link. <https://fh.unpatti.ac.id/tenaga-pendidik/>, Sistem informasi data Akademik SITAMA dengan link. <https://sitama.fhukum.unpatti.ac.id/main>, Sistem Informasi data Stock ATK/BHP dengan Link <https://atk.fhukum.unpatti.ac.id>, Similaritas iTenticate dengan link. <https://www.ithenticate.com>.

Pada Sistem keuangan menggunakan sistem Sikeu yang terintegrasi dengan Universitas

Sasaran Strategis 2. Layanan Prima

Indikator 2.1. Persentase lulusan S1 yang berhasil mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta.

Peningkatan kualitas SDM dari lulusan perguruan tinggi diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja yang dinamis, produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan kebutuhan pasar dan industri 4.0. Target yang ditentukan oleh kementerian bagi semua 62 PTN adalah bahwa 80 % lulusan siap dan mendapatkan pekerjaan atau membuka lapangan pekerjaan. Capaian Fakultas Hukum unpatti di tahun 2021 adalah Capaian Fakultas Hukum unpatti di tahun 2021 untuk lulusan yang telah bekerja pada lulusan April dan Agustus 2021 sebanyak 233 lulusan adalah sebesar 31,33 %, target dari target PK yang mengikuti target kementerian yakni 80 %. Upaya Fakultas Hukum Universitas Pattimura dalam peningkatan kualitas SDM lulusan adalah : a.) Mempersiapkan lulusan dengan memberikan pengetahuan dasar tentang berwirausaha hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pembiayaan untuk kegiatan kewirausahaan mahasiswa Fakultas Hukum Sebesar 67.200.000,- Unit kegiatan Mahasiswa kewirausahaan meresmikan “TRIAL PROGRAM UKMK”.

akan melaksanakan empat programnya yaitu entrepreneur Ship Class, Barista Class, Bartender Class dan Bisnis Class, b) Mempersiapkan lulusan yang berkompeten dan berkualitas dalam upaya pengembangan diri setelah lulus dengan mengikuti kegiatan paralegal dan setelah lulus beberapa bulan Bersama PERADI melakukan Pelatihan Beracara guna meningkatkan Sumber Daya Manusia yang siap pakai dalam memenuhi pangsa pasar kerja sehingga lulusan S1 Dibekali dengan bersertifikasi/profesi Advokat.



Gambar.3.1. Kegiatan kewirausaha Barista

Indikator 2.2. Presentase lulusan S1 yang menghabiskan paling tidak 20 SKS di luar kampus atau meraih prestasi minimal tingkat nasional.

Dengan memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Ini adalah bentuk kemerdekaan belajar yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan tujuan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya

sesuai dengan passion dan bakatnya. Universitas Pattimura mengimplementasikan merdeka belajar yakni : Fakultas Hukum Unpatti sebesar 60, % dari target 30 %. Fakultas Hukum realisasi kegiatan ini berupa mengirim 5 Mahasiswa Magang di PT. Pelindo Jakarta, 4 Mahasisiwa Magang Pada DPR RI Jakarta, 6 Mahasisiwa Mengikuti Program MBKM 18 Mahasisiwa Menjuarai Juara 3 Tingkat Nasional Lomba Peradilan Semu, 1 Mahasisiwa masuk dalam TIM PON Maluku, 1 Mahasiswa Juara 1 lomba Karya tyulis ilmiah Bahasa inggris, 150 Mahasiswa Magang pada Kejaksaan Tinggi (KEJATI) Maluku.



Gambar 3.2 Kegiatan Magang Pada DPR RI dan PT.PELINDO Jakarta

Indikator 2.3. Presentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS 100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industry atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 tahun.

Dosen yang adalah pendidik yang profesional dan ilmuwan dengan tugas utama melakukan tridharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh dosen yang meliputi bidang : Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penunjang Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam mengembangkan peran sebagai tenaga

professional maka dosen berfungsi sebagai agen pembelajaran baik kegiatan pembelajaran pada prodi ilmu hukum sendiri dan berkegiatan tridharma diluar kampus ada 8 (delapan) dosen Fakultas Hukum mengajar sebagai Tutor Tutorial Webinar (TUWEB) kampus Universitas Terbuka Ambon. Terdapat 6 (enam) Dosen disamping memberikan pembelajaran dikelas juga melakukan tugas sebagai pendampingan UKM (unit kegiatan mahasiswa) dari beberapa pendampingan yang dilakukan pada tahun 2021 ada beberapa prestasi yang dicapai berupa ; Dr. Laode Angga,SH.,MH membina mahasiswa dalam penulisan Karya ilmiah bahasa inggris dan memperoleh juara Satu tingkat nasional tahun 2021, Judy Marria Saimima, S.H., M.H. dan Reimon Supusepa,SH.,MH berhasil dalam pembinaan mahasiswa pada kegiatan Lomba peradilan Semu dan memperoleh juaran 3 tingkat nasional. Tahun 2021, Dr. Reveny V. Rugebregth, SH.,MH. Berhasil membina Tim Debat PCTA dan Meraih Juara debat Tingkat Nasional Tahun 2020, Dr. Renny Nendissa, SH.,MH., Membimbing Mahasiswa pada Kegiatan Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia tahun 2018 Tingkat Regional Timur. Tahun 2018

Presentase yang dicapai oleh Fakultas Hukum Universitas Pattimura 16.09% % dari target yang direncanakan 15 %. Dengan realiasi pada kegiatan 8 Dosen sebagai Tutor Tutorial Webinar (TUWEB) kampus Universitas Terbuka Ambon, 6 dosen membina Mahasiswa pada kegiatan lomba tingkat nasional dan memperoleh Juara selama lima tahun.



Gambar 3.3. Juara 3 Lomba Peradiran SEMU Tingkat Nasional di Kendari 2021

Indikator 2.4. Presentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi profesi yang diakui oleh dunia kerja atau berasal dari kalangan praktisi professional atau dunia kerja.

Jumlah Dosen ASN Fakultas Hukum yang berkualifikasi S3 sampai dengan Desember 2021 sebanyak 46 orang dari total dosen ASN 87 atau 52 %. 46 dosen berkualifikasi S3 semuanya memiliki kompetensi sertifikasi dosen, dan dari 46 dosen berkualifikasi S3 ini juga ada sekitar 25 dosen atau (54%) yang diakui di dunia kerja atau kalangan praktisi professional industry atau kerja. Pada bidang- bidang kegiatan yang terdiri dari 10 Orang diminata sebagai saksi ahli pada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi dan TUN serta POLDA MALUKU, 1 Orang Sebagai Dekan pada salah satu Universitas Kristen Maluku di Kota Ambon, 8 (delapan) Orang sebagai Tim Ahli Hukum/Asistensi atau praktisi yang diakui pada Instansi Pemerintah Daerah dan BUMN serta 7 Orang sebagai narasumber pada Kegiatan Seminar-Seminar Nasional.

Indikator 2.5. Jumlah keluaran penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat recognition per internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.

Jumlah penelitian internasional yang dihasilkan oleh Fakultas Hukum per dosen berupa publikasi jurnal internasional penelitian internasional yang dihasilkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pattimura per dosen berupa publikasi jurnal internasional sebanyak 19 Jurnal (data sinta.ristekbrin.go.id dan google scholar) dengan rincian 10 publikasi terindeks scopus dan 9 publikasi internasional lainnya terekam di Google Scholar , dari jumlah dosen tetap 87 orang atau capaian sebesar 0,21 % dari target 0,15. Dari capaian tersebut Fakultas Hukum Universitas Pattimura sudah memenuhi target namun upaya untuk meningkatkan terus penelitian guna pengembangan kualitas sumber daya manusia/dosen pendidikan tinggi.

Indikator 2.6. Presentase Program Studi S1 yang melaksanakan kerjasama dengan mitra.

Kerjasama adalah pengaturan kemitraan saling menguntungkan yang dilakukan oleh dua bidang pihak atau lebih. Kerjasama ini menjadi hal yang menguntungkan karena beberapa permasalahan menjadi lebih ringan. Manfaat kerjasama juga akan mempengaruhi banyak aspek yang akan dirasakan oleh kedua pihak ataupun kelompok yang memang sedang saling mempererat hubungan mereka dalam pekerjaannya. Universitas Pattimura melakukan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan berbagai pihak sebagai suatu cara untuk membangun hubungan yang baik dan harmonis sebelum adanya kontrak lain atau perjanjian kerjasama yang sifatnya lebih spesifik. Perjanjian kerjasama yang selama ini dilakukan oleh Universitas Pattimura meliputi kerjasama dalam negeri maupun luar negeri. Adapun lingkup kerjasama yang dilaksanakan antara lain : 1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pelatihan, 2. Penyelenggaraan

kolaborasi riset dan pengembangan kompetensi sumberdaya 3. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar dan lokakarya 4. Kerjasama bisnis yang disepakati oleh para pihak 5. Kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak. - Kerjasama luar negeri yang dilakukan lingkup penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pelatihan, sebanyak Program studi yang melaksanakan kerjasama dengan mitra sebesar 100 % dengan lingkup kerjasama dalam dan luar negeri meliputi penyelenggaraan pendidikan, Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kolaborasi riset dan pengembangan sumberdaya, penyelenggaraan karya ilmiah, yang terdiri dari 4 (empat) Kerjasama perpanjangan, dan 8 (delapan) Kerjasama baru ditahun 2021. Adapun kerjasam yang dialkuan Fakultas Hukum Berupa :

1. Consorsium Agreement, Nuffic, Orange Knowledge Program (OKP), Strengthening Legal Education in Estern Indonesia (Sleei)
Project Number : 1010-1456
Contract Number : C095/ 2019
2. PKS antara Kantor wikayah kementrian HUKUM dan HAM tentang Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor. W28/912.HH.05.05 Tahun 2021
Nonor 2157/UN13.1.1/KS/2021
3. PKS antara dinas pariwisata provensi Maluku dengan Fakultas Hukum Unpatti tentang peyusunan naskah akademik dan pembentukan RANPERDA LIFE and BOARD nomor 3766/UN13.1.1/KS/2021
4. Nota Kesepakatan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provensi Maluku Tentang Pengembangan sivitas akademika, penelitian, pemberian bantuan hukum, permintaan saksi ahli. Nomor 032/PM.04/K.BM/08/2021
Nomor. 4476/UN13/UN1.1/KS/2021
5. PKS antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Seram Bagian Barat . Tentang Penyusunan Naskah Akademis dan Draf RANPERDA, Perubahan status desa menjadi desa adat/ negeri pada Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor.414.1/... Tahun 2021
Nomor 5455/UN13.1.1/KS/2021

6. MOU dengan Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia DPD LPRI Provinsi Maluku, tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat dan Pengawasan dan Monitoring dalam Proses Penegakan Hukum.
Nomor. 09/DPD/LPRI/IX/2021
Nomor. 507/UN13.1.1/KS/2021
7. MOU dengan PERADI Cabang Ambon tentang Menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat.
Nomor. 001/DPC AMB/PERADI/IX/2021
Nomor. 5644/FAKHUM.AMB/IX/2021
8. PKS dengan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Pelaksanaan Pengamatan atas Kinerja dan Perilaku Jaksa dalam proses praperadilan.
Nomor. PKS-001/KK/12/2018
Nomor. 3955/UN.11/KS-DN/2018
9. PKS dengan Kantor Wilayah- Kementrian Hukum dan Ham Maluku tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual Personal dan komunal di Provinsi Maluku.
Nomor. W-28-3223 TI.04.02 Tahun 2020
Nomor. 3209/W13.11/LL/2020
10. PKS dengan Negeri Layeni tentang Pendidikan dan Pemberdayaan Hukum Masyarakat.
Nomor ; 056/KPN-L-IX/2021
Nomor ; 5100/UN13.1.1/LL/2021
11. PKS dengan Wotay tentang Pendidikan dan Pemberdayaan Hukum Masyarakat.
Nomor : 220/KPNW/2021
Nomor ; 5098/UN13.1.1/LL/2021
12. PKS dengan Negeri Lesluru tentang Pendidikan dan Pemberdayaan Hukum Masyarakat.
Nomor : 422.1/0130/KPMN-L/IX/2021
Nomor :5099/UN13.1.1/LL/2021

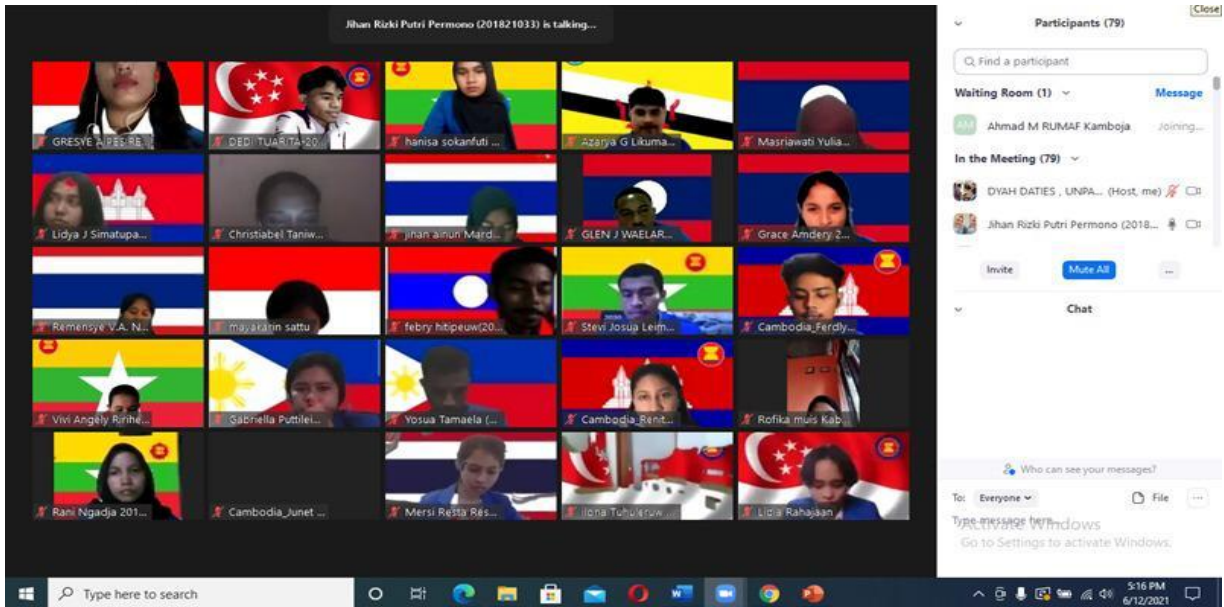
Gambar salah satu Kerjasama :

Indikator 2.7. Persentase mata kuliah Yang Menggunakan Metode Pembelajaran Pemecahan Kasus (Case Method) atau Pembelajaran Kelompok Berbasis Project.

Metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project merupakan salah satu inovasi dalam pembelajaran yang dapat digunakan, karena bertujuan melatih mahasiswa dalam berpikir kritis, kreatif dan rasional, aktif berkolaborasi dan berkomunikasi, dan meningkatkan pemahaman materi yang diajarkan serta

memberi pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. Pembelajaran Kelompok Berbasis Project merupakan proses inquiry dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun (a guiding question) dan membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek (materi) dalam kurikulum. Pada saat pertanyaan terjawab, secara langsung peserta didik dapat melihat berbagai elemen mayor sekaligus berbagai prinsip dalam sebuah disiplin yang sedang dikajinya .

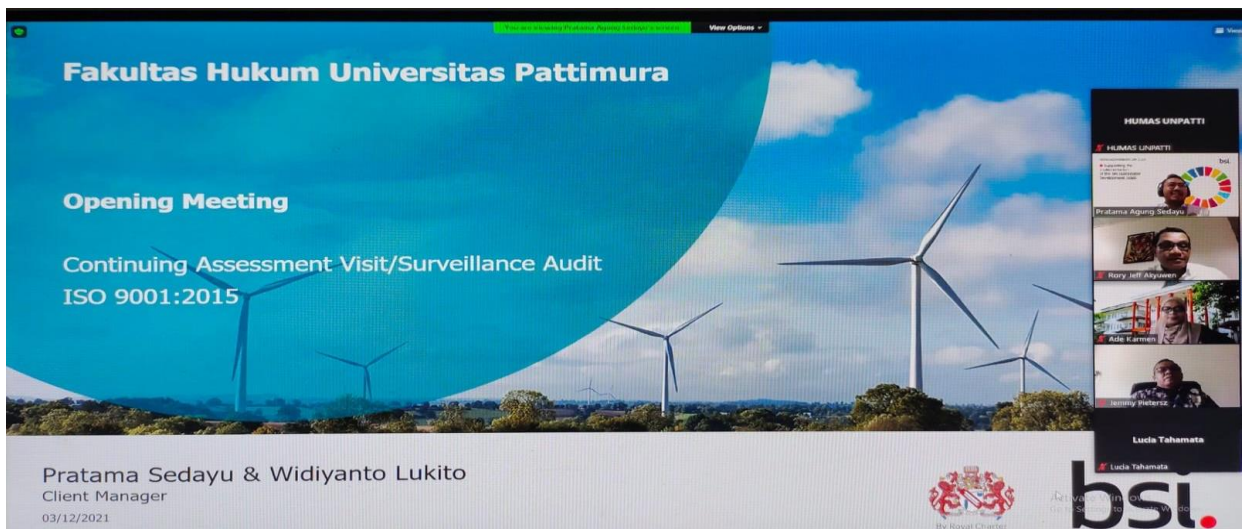
Metode pembelajaran ini sudah diterapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pattimura pada Program studi dengan 7 mata kuliah dari total 62 mata kuliah atau sebesar 11,29%, dan target pada PK Rektor sebesar 35%, ini masih belum memenuhi target, untuk saat ini fakultas hukum sementara melakukan revitalisasi kurikulum untuk menambah MK Praktek, dengan alokasi biaya Pembelajaran Praktek sebesar Rp. 175.875.000,-. Pendidikan dan dunia kerja bukan hanya menyiapkan lulusan yang siap kerja karena memiliki ketrampilan atau keahlian yang dibutuhkan dunia industri. Pendidikan juga mesti melatih lulusan untuk mampu mandiri menjadi wirausaha yang membuka lapangan kerja bagi dirinya dan orang lain. Pendidikan dan dunia kerja jadi fokus yang penting saat ini. Mahasiswa berlomba-lomba menjadikan kampus untuk mencari pengalaman mulai dari kegiatan wirausaha agar bisa menjadi entrepreneur, pengalaman adalah guru terbaik (*Experience is the best teacher*) Fakultas Hukum sebagai salah satu kampus yang membekali mahasiswa dengan berbagai program antara lain mendirikan unit kegiatan kampus wirausaha, mengikuti program-program wirausahaan yang dilakukan Kemendikbud diharapkan lulusan sampai memasukan salah satu matakuliah kewirausahaan di perkuliahan. Sebahagian besar mahasiswa Fakultas Hukum sudah menyadari betapa pentingnya wirausaha untuk mengatasi pengangguran setelah mereka tamat mereka sudah dapat langsung berkerja...[\MATRIKX INDIKATOR KINERJA 2021\Mata Kuliah S1 pemecahan kasus \(case Method\)\Praktek Acara Perdata Kelompok 1 Kelas R4G.mp4](#)



Gambar.3.4 Praktek Sidang ASEAN Hukum Internasional

Indikator 2.8. Presentase program studi S1 yang memiliki sertifikat Internasional yang diakui pemerintah.

Untuk indikator ini capaian Fakultas Hukum Universitas Pattimura sebesar 100 % atau 1 program studi (Ilmu Hukum) terakreditasi/sertifikasi internasional sudah pada tahun ke -2 dengan tiap tahun dilakukan surveilance untuk mempertahankan sertifikasi ISO 9001 ; 2015



Gambar 3.5 Survelance ke 2 ISO 9001 : 2015

B. Realisasi Anggaran

Tahun 2021 Pendapatan Fakultas Hukum dari PNBP mengalami peningkatan namun tidak dalam pengelolaan anggaran hal ini disebabkan ada pembagian alokasi anggaran ke beberapa pos kegiatan berupa 40% untuk Pembayaran Remunerasi dan 20% untuk Universitas sisanya baru digunakan oleh Fakultas dalam pelaksanaan Operasional Kegiatan.

Dapat dijelaskan pada table dibawah ini jumlah pendapatan dan alokasi pembagian ;

Jenis Pendapatan PNBP	Jumlah
UKT Genap 2020/2021 Dari 1.757 mahasiswa	4.487.375.000,-
UKT Ganjil 2021/2022 Dari 2.829 Mahasiswa	6.241.675.000,-
UKT dari Mha 194 sem 2,4,6 dan 3,5,7	608.450.000,-
Bidikmisi Ganji (386) Bidikmisi Genap (283)	1.709.400.000,-
Total Pendapatan	13.046.900.000,-

Tabel.3.1.Rincian Pendapatan PNBP Fakultas TA. 2021

Alokasi Pembagian Anggaran	Jumlah
Remunerasi 40%	5.218.760.000,-
Universitas 20%	1.565.628.000,-
Total	6.784.388.000,-
Anggaran yang dikelola Fakultas	6.352.955.000,-

Tabel.3.2.Rincian Alokasi Pembagian Anggaran Fakultas TA. 2021

Alokasi anggaran dari pagu awal dengan nilai Rp. 4.256.133.000,- pada RKAK-L Fakultas Hukum dilakukan revisi untuk dengan nambah berberapa output kegiatan untuk dapat menggunakan dana sebesar 6.352.955.000,- sebagaimana terlihat pada table dibawah ini;

No	Keterangan	Jumlah
1	Pagu Awal sebesar	Rp. 4.256.133.000,-
2	Revisi 1 pagu saldo awal Rp. (604.000.000,-)	Rp. 4.861.048.000,-
3	Setelah penerimaan semester Ganjil 2021/2022 dan terdapat kelebihan pagu sebesar 1.492.822.000,- maka dilakukan revisi penambahan output kegiatan	Rp. 6.352.955.000,-

Tabel. 3.3 Rician Revisi Pergeseran Anggaran 2021

Dengan demikian Realisasi Anggaran dapat dilihat dengan analisis akuntabilitas keuangan dimana analisis akuntabilitas keuangan adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja. Hal ini dapat dilihat dari rencana target keuangan masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan dengan serapan keuangannya. Sesuai dengan dokumen rencana kerja Fakultas Hukum Universitas Pattimura Tahun 2021, maka pencapaian realisasi anggaran dari setiap sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Kode	Satker/Kegiatan/Output	Pagu	Realisasi	Selisih	%
1	4471.QEI.001	Penelitian PNB/BLU	786,104,000,-	786,103,999,-	1	99%
2	4471.QEI.002	Pengabdian kepada masyarakat pnbp/blu	80,000,000,-	60,000,000,-	20,000,000	75%
3	4471.RAA.001	Sarana pendukung pembelajaran (pnbp/blu)	579,143,000,-	561,241,000,-	17,902,000	97%
4	4471.RAA.002	Sarana pendukung perkantoran (pnbp/blu)	716,511,000,-	716,494,000,-	17,000	99%
5	4471.RCA.002	Pemeliharaan sarana perkantoran (pnbp/blu)	29,000,000,-	29,000,000,-	-	100%
6	4471.RDJ.002	Pemeliharaan prasarana perkantoran (pnbp/blu)	323,044,000,-	322,837,000,-	207,000	99%
7	4471.SBA.001	Layanan pendidikan (pnbp/blu)	232,280,000,-	232,274,497,-	5,503	99%
8	4471.TAA.001	Dukungan layanan pembelajaran (pnbp/blu)	699,238,000,-	699,228,126,-	9,874	99%
9	4471.TAM.001	Layanan pengembangan sistem tata kelola kelembagaan dan sdm (pnbp/blu)	1,262,017,000,-	1,258,510,717,-	3,506,283	99%
10	4471.TAA.001	Dukungan layanan pembelajaran (pnbp/blu)	958.620.000,-	931.924.595,-		
11	4471.TAM.001	Layanan pengembangan sistem tata kelola kelembagaan dan sdm (pnbp/blu)	686.998.000,-	686.700.903,-	297.097,-	99%
Total			6.352.955.000,-	6.284.314.837,-		99%

Tabel.3.11. Realisasi Serapan Anggaran PNB/BLU Berdasarkan RKAK-L kultas Hukum Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Kegiatan	Kinerja Keuanagan			
			Pagu	Realisasi	Selisih	%
1	Kinerja Pengelolaan Keuangan Efektif, Efisien dan Akuntabel	Rasio Pendapatan PNBP Fak. Terhadap Biaya Operasional	13.046.900.000,-	6.352.955.000,-	-	48%
		Jumlah Pendapatan PNBP	13.046.900.000,-	6.352.955.000,-		48%
		Jumlah Pendapatan PNBP Yang bersumber dari Pengelolaan Aset	25.500.000,-	25.500.000,-	-	100%
		Modernisasi pengelolaan Keuangan PNBP	-	-	-	11,33 %
Layanan Prima		Presentasi Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang Berhasil mendapat Pekerjaan, Melanjutkan Studi, atau Menjadi Wiraswasta.	220.138.000,-	220.138.000,-	-	100%
		Presentasi Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang Menghabiskan Paling Tidak 20 sks di luar Kampus atau Meraih Prestasi Paling Rendah Tingkat Nasional.	279.775.000,-	278.779.092,-	995.908,-	99,2%
		Presentasi Dosen yang Berkegiatan Tridarma di Kampus Lain, di QS100 Berdasarkan Bidang Ilmu (<i>QS100 by Subject</i>), Bekerja sebagai Praktisi Didunia Industri, atau Membina Mahasiswa yang Berhasil Meraih Prestasi Minimal Tingkat Nasional Dalam 5 (lima) Tahun Terakhir	124.222.000,-			100%
		Persentasi Dosen Tetap Berkualifikasi Akademik S3 , memiliki Sertifikasi Kompetensi /Profesi yang diakui oleh Industri dan Dunia Kerja, atau berasal dari Kalangan Praktisi Profesional, Dunia Industri, atau	230.660.000,-	-		100%

	Dunia Kerja				
	Jumlah Keluaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berhasil Mendapat Rekognis Internasional atau diterapkan Oleh Masyarakat Per Jumlah Dosen	866.104.000,-	1		100%
	Persentasi Prodi S1 dan D4/D3/D2 yang Melaksanakan Kerjasama dengan Mitra.	82.113.500,-	82.113.500,-	-	100%
	Persentasi Mata Kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan pemecahan kasus (<i>case Method</i>) atau pembelajaran Kelompok Berbasis Projek (<i>Project-based</i>) Sebagai Bobot Evaluasi.	86.250.000,-	86.250.000,-		100%
	Presentasi Program Studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki Akreditasi atau Sertifikasi Internasional yang diakui Pemerintah.	86.826.000,-	86.826.000,-		100%

Tabel 3.12. Alokasi dan Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya target dari Indikator Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Kemendikbud 2021

Dengan demikian dapat disimpulkan capaian realisasi anggaran Fakultas Hukum Unpatti 2021 yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja berdasarkan penyelarasan sebesar Rp.1.976.088.000,- sekitar 31% dari pagu anggaran RKAK-L Fakultas Hukum, sementara sisa 69% digunakan untuk pembiayaan kegiatan;

1. Layanan Pendidikan sebesar 3.65% dengan nominal anggaran 232.280.000,-
2. Sarana prasarana pendukung pembelajaran sebesar 20 % dengan nominal anggaran Rp. 1.278.381.000,-

3. Sarana prasarana pendukung perkantoran sebesar 11.27% dengan nilai nominal sebesar Rp. 716.511.000,-
4. Layanan Pembelajaran sebesar 26.09% dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.657.858.000,-
5. Layanan pengembangan sistem tata kelola kelembagaan sebesar 10.81% dengan nilai nominal Rp 686.998.000,-

Banyak indikator yang tidak ada dalam pembiayaan membuat capain kinerja menjadi belum maksimal diharapkan tahun 2021 penyusunan anggaran harus memperhatikan indikator kinerja yang mendukung kontrak kerja Pimpinan.

BAB IV PENUTUP

Secara garis besar evaluasi terhadap Program Kegiatan tahun 2021 telah berhasil dilaksanakan, hal ini terlihat dari capaian realisasi program dan kegiatan tahun 2021 dimana 99% program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan capaian persentase rata-rata 99%, Keberhasilan ini tidak terlepas dari perencanaan yang baik sebelum dilakukan penetapan baik tujuan, sasaran program maupun kegiatan yang didukung dengan kebijakan yang tepat dan sumber daya manusia yang berkualitas.

Namun masih ada kegiatan yang belum dapat dilaksanakan, dalam proses pelaksanaannya terbentur pada kendala penetapan target yang sulit diprediksi, waktu pelaksanaan yang tidak tepat sesuai ketentuan dan sumber anggaran PNBPN yang tersedia.

dan melihat capaian Fakultas hukum, maka beberapa permasalahan dan tantangan yang menjadi perbaikan ke depan adalah :

- a. Data alumni melalui tracer studi belum optimal dalam pelacakan lulusan yang terserap didunia kerja
- b. Kegiatan mahasiswa yang belum semuanya terpenuhi disebabkan karena pandemik covid 19 yang belum berakhir sehingga kegiatan kompetisi belum berjalan secara baik.
- c. Masih belum banyak dosen dengan berkualifikasi pendidikan S3 memperoleh kompetensi profesi diluar kompetensi sertifikasi dosen.
- d. Belum ada Dosen yang Berkegiatan Tridarma di Kampus Lain, di QS100 Berdasarkan Bidang Ilmu (QS100 by Subject),

Upaya Fakultas Hukum dalam peningkatan kinerja terhadap capaian indikator antara lain :

- a. Mengoptimalkan survai Data alumni melalui tracer studi untuk pelacakan lulusan yang terserap didunia kerja
- b. Memberikan kesempatan kepada dosen dengan kualifikasi Pendidikan S3 mengikuti pendidikan kompetensi profesi diluar kompetensi sertifikasi dosen.
- c. Melakukan Kerjasama dengan kampus QS100 Berdasarkan Bidang Ilmu (QS100 by Subject Dosen yang Berkegiatan Tridarma di Kampus Lain, di QS100